

## RENCANA STRATEGIS E-GOVERNMENT DI PROVINSI PAPUA

Melkior N.N Sitokdana<sup>1)</sup>, Wing Wahyu Winarno<sup>2)</sup>

<sup>1), 2)</sup> Magister Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta  
Jl. Grafika No.2, Yogyakarta 55281

Email : [sitokdanamelkior@gmail.com](mailto:sitokdanamelkior@gmail.com)<sup>1)</sup>, [wing@mail.ugm.ac.id](mailto:wing@mail.ugm.ac.id)<sup>2)</sup>

### Abstrak

Penggunaan teknologi informasi dilingkungan pemerintahan atau Elektronik Government (*E-Government*) adalah urusan wajib pemerintah dalam rangka menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, bersih, transparan, akuntabel dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien dengan melakukan perbaikan organisasi, sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan. Dengan demikian, antar pemerintah, masyarakat, dan pihak bisnis dapat mengakses informasi dan bertransaksi secara cepat, tepat dan murah. Pemerintah Provinsi Papua selama ini memanfaatkan Sistem Informasi *E-Government* untuk kepentingan pemerintahan namun secara umum belum optimal karena tidak melalui proses perencanaan yang baik, hal tersebut dapat dilihat dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kominfo. Untuk itu, paper ini mengkaji dan memberikan usulan Rencana Strategis *E-Government* tahun 2015-2019, yang diawali dengan analisis PEST (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi) tentang lingkungan eksternal secara umum di Provinsi Papua, Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats) untuk lingkungan pemerintah, dan analisis pemanfaatan Sistem Informasi *E-Government* menggunakan metode McFarlan Grid Strategik. Tahap terakhir adalah mengusulkan rencana induk *E-Government* sebagai dasar pengembangan pemerintah kedepan.

**Kata Kunci:** Rencana Strategis, *E-Government*, Analisis PEST, Analisis SWOT

### 1. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menjadi kewajiban pemerintahan saat ini dalam rangka meningkatkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau *Electronic Government (E-Government)*. Pengembangan dan pemanfaatan *E-Government* yang dimaksud dapat diaplikasikan pada legislatif, eksekutif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Model *E-Government* adalah *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer (G2C)*,

*Government-to-Business (G2B)* serta *Government-to-Government (G2G)*.

Dasar hukum pemanfaatan dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau disingkat *E-Government* adalah sebagai berikut; UUD 45 pasal 28 F, INPRES No.3 Th.2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU No.14 Th.2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HaKI, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dsb. Dengan adanya regulasi tersebut cukup menjamin pemerintah pusat dan pemerintah daerah membangun Sistem *E-Government*.

Agar tercapainya produk *E-Government* yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan publik maka dibutuhkan perencanaan strategis yang baik. Perencanaan strategis (Renstra) yang dimaksud adalah *road map* pembangunan jangka panjang yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama yang menyangkut keunggulan, peluang, kendala, dan tantangan. Renstra diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Pemerintah Provinsi Papua telah lama memanfaatkan aplikasi *E-Government*, namun belum optimal karena setiap SKPD membuat Sistem Informasi masing-masing (masih ada ego sektoral) sehingga tidak mudah untuk diintegrasikan, hal ini dipengaruhi juga dengan kondisi perkantoran yang letaknya terpisah-pisah, dan tidak meratanya infrastruktur SI/TI. Untuk itu perlu adanya perencanaan jaringan yang mampu mengintegrasikan beberapa SKPD yang terpisah dengan kantor pusat pemerintahan. Selain itu, secara umum proses bisnis pemerintahan masih manual (*paper-based*) sehingga pelayanan informasi dan transaksi dari pemerintah daerah sangat lambat.

Berbagai permasalahan diatas seakan menjadi persoalan klasik pemerintahan di Indonesia pada umumnya dan di Papua pada khususnya. Berbagai regulasi telah dikeluarkan untuk mengatur sistem administrasi dan manajemen pengelolaan pemerintahan namun masih saja dijumpai persoalan ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam pengelolaan administrasi. Hal ini bisa terjadi karena pemerintah provinsi Papua belum memiliki perencanaan strategis yang mampu menyelaraskan antara strategi bisnis dan strategi SI/TI. Keadaan ini jelas sangat memprihatinkan dan pemerintah

seharusnya membutuhkan SI/TI untuk memberikan solusi bagaimana cara mengatasinya.

Berdasarkan isu strategis dan beberapa persoalan utama yang diuraikan diatas maka alasan perlunya perencanaan strategis Sistem Informasi/Teknologi Informasi menurut Earl seperti dikutip oleh Indrajit (2005) adalah sebagai berikut: (1) mewujudkan sistem dan tata laksana administrasi yang efektif, efisien, dan profesional sehingga dapat dipertanggungjawabkan. (2) Renstra diperlukan untuk mewujudkan sinergi melalui integrasi data dan proses komunikasi antara SKPD dan lembaga terkait lainnya. (3) Strategi SI/TI dibuat supaya selaras dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan strategi organisasi. Semua pengembangan aplikasi dan infrastruktur harus membantu proses bisnis organisasi dan layanan kepada publik. (4) Aplikasi-aplikasi *E-Government* yang akan dibuat harus terintegrasi dengan baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) atau bahkan duplikasi pembuatan aplikasi *E-Government*. (5) Infrastruktur SI/TI yang digunakan oleh pemerintah provinsi Papua sebaiknya berbasis EA sehingga kebutuhan organisasi dapat terakomodasi dengan baik dan saling terintegrasi [1]. Maka dirasa perlu untuk dilakukan suatu perencanaan strategis *E-Government* di lingkungan pemerintah provinsi Papua yang mampu menyelaraskan antara strategi bisnis dan strategi SI/TI sehingga dapat tercapai tujuan secara efektif dan efisien terutama dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

## 2. Pembahasan

### A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode deskriptif kualitatif [2], yang secara rinci terbagi menjadi 3 tahapan yaitu:

- 1) Melakukan identifikasi terhadap lingkungan pemerintahan Provinsi Papua melalui observasi, studi literatur dan wawancara terhadap Bappeda, Bagian Humas dan protokoler, Bagian Biro Tata Pemerintahan, Kepala Dinas Kominfo beserta Kepala-Kepala Bidang.
- 2) Berdasarkan penelitian tersebut dilakukan analisis lingkungan eksternal secara umum tentang kondisi Papua menggunakan analisis PEST (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi) yang dapat berpengaruh terhadap pengembangan dan pemanfaatan *E-Government*, analisis lingkungan internal dan eksternal bisnis menggunakan SWOT, dan analisis tingkat kegunaan aplikasi *E-Government* menggunakan *McFarland Strategic Grid* menurut interpretasi Ward and Peppard.
- 3) Menyusun formulasi pengembangan *E-Government* kedepan

### B. Analisis PEST

Setelah melakukan proses observasi, studi literatur dan wawancara, dilakukan proses analisis kondisi provinsi Papua dalam mendukung pengembangan dan pemanfaatan *E-Government*, analisis tersebut

menggunakan analisis PEST. PEST membagi lingkungan dalam 4 (empat) area. Area tersebut adalah politik, ekonomi, Sosial dan Teknologi. Dengan mengenali dan mengevaluasi peluang dan ancaman eksternal, organisasi mampu mengembangkan visi dan misi sebagai dasar strategi yang tepat untuk mencapai sasaran jangka panjang. Berikut hasil analisis PEST pada provinsi Papua.

#### 1) Aspek Politik

- a) Dasar hukum pemanfaatan dan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik atau disingkat *E-Government* adalah sebagai berikut; INPRES No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU No.14 Th.2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HaKI, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dsb.
- b) Adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua, telah memberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri untuk tercapainya kesejahteraan, peningkatan taraf hidup masyarakat, serta memberikan kebijakan khusus yang didasarkan pada nilai-nilai dasar, seperti supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara.
- c) Masih ada gejala disintegrasi, yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat karena tidak puas dengan proses penyerahan Papua ke Pangkuan NKRI oleh Belanda. Hal ini turut mempengaruhi proses pembangunan di Papua.
- d) Dukungan pemerintah Provinsi dan semua *stakeholder* dalam membentuk Komisi Informasi Publik berdasarkan UU No.14 Th.2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
- e) Untuk menjawab ketertinggalan pembangunan maka pemerintah pusat membentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat (UP4B), yang adalah lembaga untuk mendukung koordinasi, memfasilitasi, dan mengendalikan pelaksanaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- f) Dan regulasi-regulasi serta kebijakan-kebijakan lainnya yang memihak terhadap pembangunan Papua.

#### 2) Ekonomi

Kemiskinan merupakan permasalahan yang paling mendesak dan selalu menjadi prioritas untuk ditanggulangi, mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya sangat besar terhadap pelaksanaan pembangunan, misalnya dapat mengurangi produktifitas, memperbesar konflik multidimensi, meningkatkan eksploitasi sumber daya yang berlebihan, dan sebagainya. Persentase penduduk

miskin di Provinsi Papua masih lebih tinggi dari rata-rata Nasional, yaitu sebesar 14,15%. Kondisi tersebut menempatkan Papua pada peringkat ke-33 dari 33 Provinsi di Indonesia. Meskipun prosentase kemiskinan Papua mengalami penurunan, tapi nampak ketimpangan wilayah masih sangat tinggi khususnya didaerah atau kabupaten-kabupaten di pegunungan. Kondisi awal pada tahun 2011 Persentase penduduk Miskin di Papua sebesar 31,98% dan target sampai 2018 menurun 25%. Untuk memberantas kemiskinan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang diatur melalui SK Gubernur No 140 tahun 2007 tentang pelaksanaan rencana strategis pembangunan kampung (RESPEK) yang dibiayai dari anggaran otonomi khusus Papua, terlepas dari program nasional PNM Mandiri Pendesaan. Istilah RESPEK kemudian ganti menjadi PROSPEK (Program Strategis Pembangunan Ekonomi Kampung) melalui peraturan daerah khusus (Perdasus) provinsi Papua nomor 25 tahun 2013 [3].

### 3) Sosial

#### a) Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus 2010 penduduk Papua berjumlah 2.833.381 jiwa atau rata-rata mengalami pertumbuhan 5,24% per tahun [3].

#### b) Budaya

Pembangunan masyarakat Papua tidak dapat terlepas dari unsur kebudayaan. Berhasil tidaknya pembangunan di Papua sangat dipengaruhi oleh fleksibilitas dan responsibilitas budaya orang Papua terhadap program-program pembangunan yang dijalankan. Oleh karenanya mengenal lebih jauh budaya Papua merupakan salah satu *key word* dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Papua dalam perspektif jangka panjang [3].

#### c) IPM

Dalam prakteknya ada 4 komponen pokok yang digunakan untuk mengukur besarnya angka IPM, yaitu (1) angka harapan hidup, (2) angka melek huruf, (3) rata-rata lama sekolah, dan (4) angka pengeluaran riil perkapita.

#### ❖ Angka harapan hidup

Aspek kesehatan yang terpantau pada komponen harapan hidup. Angka harapan hidup di Provinsi Papua menunjukkan angka yang terus meningkat, dari 67,60 tahun di tahun 2006 menjadi 68,60 tahun di tahun 2010, atau naik sebanyak satu point. Semua daerah kabupaten/kota baik itu di pegunungan dan pedalaman maupun pesisir dan dataran rendah mempunyai harapan hidup yang relatif sama yaitu diantara 62 tahun paling rendah di Merauke dan 69,6 tahun paling tinggi di Mimika. Namun

HIV dan AIDS adalah salah satu penyakit yang berbahaya bagi masyarakat Papua dengan tingkat kejadian yang luar biasa per seratus ribu penduduk. Pada tahun 2011, jumlah penduduk Papua penderita HIV sebanyak 5362 orang dan penderita AIDS sebanyak 7914 orang.

Selain itu, gizi buruk pada tahun 2007 sebesar 4.420 (22,2%) dan namun pada tahun 2011 menurun dengan angka 1.612 (6,1%). Walaupun ada penurunan potensi untuk meningkat tetap ada karena kondisi ekonomi masyarakat yang masih sangat rendah terkait pengetahuan kesehatan Untuk menjawab persoalan ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan jaminan kesehatan bagi penduduk asli Papua, atau sering disebut JAMKESPA. Dengan kebijakan tersebut penduduk mendapat layanan kesehatan secara gratis di seluruh puskesmas dan rumah sakit yang berada di Provinsi Papua. [3].

#### ❖ Angka melek huruf

Sepanjang tahun 2006-2011, tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua paling rendah di seluruh Indonesia. Perkembangannya setiap tahun juga menunjukkan tidak ada perubahan yang berarti, cenderung stagnan. Misalnya diantara tahun 2006 - 2011 persentase melek huruf penduduk di Provinsi Papua mengalami perkembangan yang stagnan sebesar 75,81 persen setiap tahun[3].

#### ❖ Rata-rata lama sekolah

Begitu juga dengan lama sekolah dapat dikatakan juga berkembang stagnan, dimana selama tahun 2006 hingga 2008 tidak mengalami penambahan, selalu 6,5 tahun. Terjadi kenaikan ditahun 2011 menjadi 6,69 tapi kenaikannya hanya 0,1 persen. Baik melek huruf maupun rata-rata lama sekolah di Papua ini terpaut sangat jauh bila dibandingkan dengan Indonesia secara keseluruhan. Di Indonesia rata-rata melek huruf penduduk 15 tahun ke atas adalah 92,4 persen, sedangkan rata-rata lama sekolah adalah 7,6 tahun [3].

#### ❖ Pendapatan Perkapita

Aspek ekonomi, seperti yang terpantau pada komponen pendapatan per kapita, relatif merata. Meski pun di sebagian besar daerah pesisir dan dataran rendah mempunyai pendapatan per kapita yang lebih tinggi dengan daerah pegunungan dan pedalaman namun perbedaannya tidak begitu jauh, kurang lebih deviasinya hanya 27 ribu rupiah[3].

### 4) Teknologi

Percepatan pembangunan jaringan telekomunikasi yang terus gencar dibangun di Provinsi Papua telah membuka keterisolasian informasi, dimana masyarakat yang ada didaerah terpencil di lembah-lembah, pantai, gunung-gunung sudah mulai merasakan manfaat dari teknologi informasi. Walaupun demikian, koneksi jaringan internet di provinsi Papua secara umum sangat minim, rata-rata menggunakan VSAT, sehingga cuaca yang ekstrim dan tidak menentu di Papua mengakibatkan perangkat tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, program pembangunan Nasional Palapa Ring (jaringan Fiber Optik bawah laut) yang sedang di kerjakan PT.Telkom yang direncanakan masuk di Jayapura akhir tahun 2014 diharapkan dapat

menjawab kebutuhan akses internet, sehingga semua sektor yang ada dapat didayagunakan secara efektif dan efisien.

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi selain dibangun oleh pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua, ada juga program nasional, seperti program percepatan pemerataan akses telekomunikasi dan informasi untuk daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan tidak layak secara ekonomi dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Program Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* (KPU/USO) yang dananya bersumber dari kontribusi penyelenggara telekomunikasi. KPU/USO dilaksanakan oleh suatu Badan Layanan Umum (BLU) yang disebut dengan Badan Telekomunikasi Dan Informasi Pedesaan (BTIP) [4].

Kemajuan teknologi yang berkembang dan terus meningkat ditahun-tahun yang akan datang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pola kerja, pola pelayanan dan proses pemerintahan. Hal ini disebabkan karena adanya tuntutan akan mutu pelayanan yang lebih baik. Oleh karena itu penggunaan teknologi dalam kegiatan pelayanan pemerintah daerah (*E-Government*) sudah sangat mendesak. Hal ini membuat pemerintah daerah harus berpikir untuk melakukan transformasi proses bisnis maupun budaya kerja sesuai dengan perkembangan teknologi dan tuntutan kebutuhan yang ada.

**C. Analisis SWOT**

Untuk menyusun Rencana Strategis Pengembangan *E-Government* perlu digali dan dikaji unsur-unsur yang mempengaruhi pengembangan *E-Government*. Ada 9 (sembilan) komponen pokok yang dikaji, yaitu: Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, Kepemimpinan, Sistem Manajemen dan Proses Kerja, Perangkat Keras/Komputer, Jaringan/Internet, Perangkat Lunak/Aplikasi, Data/Informasi, Pendanaan, Kebijakan/Pengaturan, Masyarakat dan Bisnis [5].

Kesembilan komponen tersebut akan dianalisis letak kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman/tantangan. Analisis SWOT ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah narasumber yang berkiatan dengan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (*E-Government*) dilingkungan pemerintah Provinsi Papua, maupun kajian terhadap dokumen pendukung yang telah dihimpun. Analisis SWOT ini pakai sebagai dasar penentuan Rencana Strategis *E-Government*, terlepas dari Rencana Strategis Dinas Kominfo Provinsi Papua tahun 2013-2018 yang sedang dalam proses implementasi. Dengan analisis SWOT maka dapat dilakukan evaluasi untuk berbenah diri membangun dan mengembangkan *sistem E-Government* yang handal dan akuntabel. Keberhasilan *E-Government* tentu saja tidak semata-mata tergantung dari 9 (sembilan) komponen tersebut, tetapi masih ada komponen lain yang tidak kalau penting, yaitu; motivasi

dan komitmen semua stakeholder dalam rangka mendukung terwujudnya pelayanan pemerintah yang lebih demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien melalui layanan *E-Government*.

**Tabel 1 Analisis SWOT**

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
1. Komitmen pimpinan daerah membangun TIK 2. Memadainya infrastruktur telekomunikasi 3. Dukungan bidang TIK oleh eksekutif maupun legislatif 4. Ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan yang cukup dikantor pemerintahan 5. Adanya panduan penyusunan RIP <i>E-Government</i>	1. Terbatasnya SDM pengelola dibidang TIK 2. Kurangnya aplikasi yang dibangun dalam jaringan dan masih parsial 3. Kurangnya akuntabilitas pengelolaan TIK 4. Pengembangan perangkat keras, perangkat lunak serta pengelolaan data belum terintegrasi dan terpadu 5. Pelayanan informasi belum <i>up to date</i>
Peluang (O)	Ancaman (T)
1. Dukungan masyarakat dalam proses pengembangan TIK 2. Adanya kerja sama dengan pemerintah daerah atau lembaga lain 3. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, canggih dan berdayaguna untuk peningkatan hasil kerja. 4. Teknologi informasi dan komunikasi dapat mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat 5. Banyak sumber dan narasumber untuk proses pembelajaran dibidang teknologi informasi dan komunikasi	1. Kurangnya konsistensi kebijakan pusat dalam mengembangkan TIK 2. Apriori sebagian staf/aparat pemerintah terhadap teknologi baru 3. Terbatasnya kapasitas tenaga listrik 4. Perkembangan Teknologi Informasi yang sangat cepat 5. Masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpadu, serta ketersediaan informasi yang akurat dan informatif 6. Dinamika masyarakat yang menuntut terciptanya <i>Good Governance</i>

Dari hasil analisis lingkungan eksternal/internal menggunakan SWOT, dilakukan matriks SWOT untuk merumuskan strategi yang dapat dilakukan, seperti terlihat pada Tabel 2.

**Tabel 2 Matriks Analisis SWOT (SO-WO)**

Strategi menggunakan kekuatan untuk mendapatkan peluang	Strategi mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
<b>Strategi SO</b> 1. Peningkatan kapasitas pusat layanan akses informasi kepada masyarakat 2. Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi 3. Peningkatan pendidikan formal SDM aparatur Negara dan masyarakat dibidang TIK 4. Mendorong aparatur pemerintah (PNS) melalui regulasi yang tegas dan jelas agar dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan publik 5. Memanfaatkan sumber dan narasumber pembelajaran TIK untuk mengembangkan <i>E-Government</i>	<b>Strategi WO</b> 1. Peningkatan Melalui DIKLAT di bidang TIK 2. Adanya integrasi sistem Aplikasi 3. Pedoman kerja atau standar pelayanan sebagai indikator kerja 4. Sempurnakan sistem pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi serta pengelolaan data yang belum terintegrasi dan handal sehingga dapat meningkatkan pelayanan masyarakat 5. Mendorong SDM untuk meningkatkan layanan informasi secara <i>up to date</i>

**Tabel 3** Matriks Analisis SWOT (ST-WT)

Strategi menggunakan kekuatan untuk menghadapi tantangan	Strategi Mengatasi Kelemahan Untuk menghadapi Tantangan
<p><b>Strategi ST</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Merancang peraturan daerah dibidang TIK yang mengacu aturan pusat</li> <li>Mewajibkan SDM melalui peraturan Gubernur agar SDM mengikuti perkembangan teknologi informasi terbaru untuk lebih meningkatkan kualitas diri dan kualitas pelayanan publik</li> <li>Mensosialisasikan keunggulan produk/aplikasi yang akan digunakan</li> <li>Merancang peraturan daerah untuk swasta membangun listrik meningkatkan pelayanan secara efektif dan efisien</li> <li>Memfaatkan ketersediaan komputer, perangkat lunak dan jaringan untuk pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu, serta ketersediaan informasi yang akurat dan informatif</li> <li>Menyusun Rencana Umum Pengembangan <i>E-Government</i></li> </ol>	<p><b>Strategi WT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pendidikan formal dan diklat yang terarah fokus pada kebutuhan</li> <li>Pengembangan pengetahuan secara bertahap dari level staf sampai pimpinan agar mempercepat pengembangan aplikasi <i>E-Government</i></li> <li>Merancang peraturan standar pelayanan</li> <li>SDM diberi penguasaan teknologi informasi terbaru</li> <li>Hindari kesalahan distribusi dan penempatan SDM yang tidak sesuai ketrampilan untuk mengurangi dampak perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat</li> <li>Hindari kelemahan sistem pengembangan perangkat keras, perangkat lunak serta pengelolaan data yang belum terintegrasi dan handal untuk mengurangi ketidakpuasan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu, serta ketersediaan informasi akurat dan informatif</li> </ol>

**D. Sistem Informasi *E-Government* Saat ini**

Sistem Informasi yang dibangun sejauh ini belum optimal, artinya yang dibangun hanya untuk lingkup unit organisasi yang menerapkan SI dan belum terintegrasi dengan unit organisasi lainnya yang memiliki hubungan dengan proses bisnis, misalnya SIM Pegawai belum terintegrasi dengan SIM Keuangan, dll. Hal ini terjadi karena belum ada perencanaan yang baik, misalnya aspek-aspek penting keberhasilan SI *E-Government* seperti regulisasi atau aturan yang jelas dan tegas dari Gubernur dan kelembagaan dibidang *E-Government* belum ada, Infrastruktur jaringan belum terdistribusi dengan baik, dan SDM belum memadai. Selain itu, berdasarkan telaah dokumen perencanaan (RPJP, RPJMD dan Renstra Dinas Kominfo) belum menemukan rencana strategis yang tegas dan jelas untuk mengembangkan *E-Government*. Sehingga belum optimalnya Sistem Informasi yang dibangun karena belum adanya perencanaan yang baik.

**Tabel 4** SI *E-Government* saat ini

SI <i>E-Government</i>	Keterangan
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPEDA)	Belum Optimal
Tujuan Tambahan Bersyarat	Belum Optimal
Sistem Absensi Digital	Belum Optimal
Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian APBD (TP2K)	Optimal
Sistem Informasi Keuangan (SIMKEU)	Belum Optimal
Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)	Belum Optimal
Sistem Pengelolaan Aset Daerah	Belum Optimal
<i>E-Procurement</i>	Optimal
Website (Papua.go.id)	Optimal
Webmail	Belum Optimal
Papua Cloud	Belum Optimal

**E. Analisis Portofolio Sistem Informasi**

Analisis digunakan untuk melihat aspek Sistem Informasi *E-Government* yang selama ini digunakan dilingkungan pemerintah provinsi Papua. Metode McFarlan digunakan untuk memetakan aplikasi serta sistem informasi yang digunakan berdasarkan kontribusinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hasil pemetaan diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 5** Portofolio Sistem Informasi Saat ini

HIGH POTENTIAL	STRATEGIC
<ol style="list-style-type: none"> <li>Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPEDA)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tujuan Tambahan Bersyarat</li> <li>Sistem Absensi Digital</li> <li>Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian APBD (TP2K)</li> </ol>
KEY OPERATIONAL	SUPPORT
<ol style="list-style-type: none"> <li>Sistem Informasi Keuangan (SIMKEU)</li> <li>Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)</li> <li>Sistem Pengelolaan Aset Daerah</li> <li><i>E-Procurement</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Website (Papua.go.id)</li> <li>Webmail</li> <li>Papua Cloud</li> </ol>

Portofolio Sistem Informasi dan aplikasi *E-Government* tersebut diatas diisi oleh Kepala Bidang Aplikasi dan Telematika Dinas Kominfo Provinsi Papua. McFarlan menyatakan aplikasi TI yang digunakan dalam perusahaan (organisasi) tidak selamanya berada dalam kuadran yang sama. Suatu saat apabila aplikasi tersebut telah berkurang dampak strategisnya, maka aplikasi tersebut akan bergeser ke kuadran lain. Pergeseran dari sistem aplikasi pada teori McFarlan ini tidak bisa terjadi secara serta merta. Pergeseran aplikasi yang digunakan dalam organisasi terjadi seketika ada perubahan situasi dan kondisi umum yang dihadapi. Dari hasil analisis kebutuhan yang diperlukan pemerintah provinsi Papua, portofolio SI yang diperlukan dimasa mendatang terlihat seperti Tabel 6.

**Tabel 6** Portofolio SI Masa Mendatang

HIGH POTENTIAL	STRATEGIC
<ol style="list-style-type: none"> <li>SIM Eksekutif</li> <li>* SIM Pelaporan dan pemerintahan</li> <li>SIM Evaluasi &amp; Informasi Hasil Pembangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>* E-Gov Portal</li> <li>GIS (Geografic Information System)</li> <li>SIM Lingkungan Hidup</li> <li>SIM Pontensi Daerah</li> <li>SIM Pertanian, Perikanan &amp; Peternakan</li> <li>SIM Pertambangan &amp; Energi</li> <li>SIM Jaminanan Kesehatan Papua (JAMKESPA)</li> <li>SIM pariwisata &amp; Budaya</li> <li>SIM Program Strategis Pembangunan Ekonomi Kampung (PROSPEK)</li> <li>SIM Pemuda &amp; Olaraga</li> <li>SIM Koperasi &amp; UKM</li> <li>SIM Kesehatan</li> <li>SIM Pendidikan</li> <li>SIM Ketenagakerjaan</li> <li>SIM Industri &amp; Perdagangan</li> <li>SIM Transportasi</li> <li>SIM Jalan dan Jembatan</li> <li>SIM Terminal</li> <li>SIM Sarana Umum</li> <li>SIM Administrasi DPRD</li> <li>SIM Hukum</li> <li>SIM BUMN</li> <li>SIM Data Pembangunan</li> <li>* Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPEDA)</li> <li>* Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (SIMBADA)</li> <li>* Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)</li> </ol>
KEY OPERATIONAL	SUPPORT
<ol style="list-style-type: none"> <li>SIM Kolaborasi dan Kordinasi</li> <li>SIM Dokumentasi</li> <li>SIM Surat/Kantor Maya</li> <li>SIM Pengaduan dan Keluhan Masyarakat</li> <li>Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Papua Cloud</li> <li>Webmail</li> </ol>

6.	SIM Pajak & Retribusi	
7.	SIM Pendaftaran & Perizinan	
8.	SIM Penanaman Modal/Investasi	
9.	* SIM Pengelolaan pendapatan daerah	
10.	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	
11.	* Sistem Informasi Absensi Elektronik	
12.	* Sitem Informasi Keuangan	
13.	* E-Procurement	
14.	SIM Kas dan Perbendaharaan	

**Keterangan:**

- \*= Sistem yang telah ada dan perlu dikembangkan
- = Yang tidak ada bintang adalah sistem yang perlu dibangun berdasarkan *blueprint* dari Kominfo.

Urutan pengembangan SI berdasarkan Tabel 6 adalah pertama *Key Operational* karena kesuksesan organisasi tergantung pada aplikasi ini, kedua *Strategic* karena SI yang kritis untuk mendukung strategi bisnis yang akan datang, ketiga *High Potential* adalah aplikasi yang memiliki potensi tinggi sebagai *core* dari proses bisnis dan terakhir adalah *Support*, kelompok SI ini bernilai tetapi tidak kritis dalam mencapai kesuksesan.

**F. Perencanaan Strategis E-Government**

Perencanaan strategis disusun dalam bentuk *roadmap* berupa rencana pengembangan *E-Government*, terlihat seperti pada tabel 6. *Roadmap* disesuaikan dengan Rencana Strategis Dinas Kominfo Provinsi Papua tahun 2013-2018 dan pengembangan Sistem Informasi disesuaikan dengan *blueprint E-Government* yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo sebagai dasar dalam pengembangan sistem informasi Pemerintahan[6].

**Tabel 7** Rencana Strategi *E-Government*

NO	PERENCANAAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi					
2	Menyusun Rencana Induk Pengembangan <i>E-Government</i>					
3	Merancang peraturan daerah dibidang SI/TI yang mengacu aturan pusat					
4	Merancang peraturan daerah untuk swasta membangun listrik meningkatkan pelayanan secara efektif dan efisien					
5	Peningkatan Kapasitas SDM					
6	Fasilitasi Peningkatan SDM dibidang TIK					
7	Pembangunan dan peningkatan komputer dan jaringan secara merata disemua lingkungan pemerintahan dan di pusat-pusat layanan publik					
8	Meningkatkan Konektivitas Jaringan Komunikasi antar wilayah					
9	Pengembangan dan integrasi Aplikasi dan Sistem Informasi yang sudah ada					
10	Penguatan keamanan aplikasi dan sistem informasi					
11	Pengadaan Sistem					

	Informasi <i>E-Government</i> (sesuai dengan pemetaan portofolio aplikasi pada tabel 6)					
12	Pengadaan server baru					
13	Mensosialisasikan pemanfaatan produk/aplikasi <i>E-Government</i> yang akan digunakan					

**4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi Papua selama ini memanfaatkan Sistem Informasi *E-Government* untuk kepentingan pemerintahan namun secara umum belum optimal karena tidak melalui proses perencanaan yang baik untuk perlu ada Rencana Induk Pengembangan *E-Government*.
- b. Rencana strategis yang dihasilkan adalah rencana pemerintah Provinsi Papua terkait dengan integrasi sistem informasi antara SKPD yang sudah diterapkan, pengembangan SI lebih lanjut disesuaikan dengan *Blueprint* pengembangan *E-Government* yang dikeluarkan Kominfo, Pengembangan SDM melalui pendidikan formal dan nonformal agar dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan SI/TI secara baik dan bertanggungjawab, peningkatan perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan secara merata dilingkungan pemerintahan maupun dipusat-pusat pelayanan publik.
- c. Dihasilkan *roadmap* rencana strategis *E-Government* yang sejalan dengan visi Dinas Kominfo Provinsi Papua, " Terwujudnya Papua Informatif menuju *E-Government* serta masyarakat berbudaya informasi melalui Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi yang Efektif dan Efisien".

**Daftar Pustaka**

- [1] Indrajit, Richardus Eko, *Kerangka Konseptual Master Plan Sistem Informasi Korporat*, Jurnal Sistem Informasi, MTI-UI, vol.1, no.1, pp. 11-17, September 2005.
- [2] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, Desember 2012
- [3] Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua 2013-2018
- [4] Dokumen BP3TI Program KPU/OSO Kementerian Kominfo, 2014
- [5] Damanik. *Rencana Strategis Pengembangan E-Government Pemerintah Kota Pekanbaru*. Thesis: MTI UGM Yogyakarta, 2008
- [6] *Blueprint Aplikasi E-Government*, Jakarta: Kementerian Kominfo, 2004

**Biodata Penulis**

**Melkior N.N Sitokdana, S.Kom**, Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, lulus tahun 2012. Saat ini menjadi Mahasiswa di Magister Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

**Dr. Wing Wahyu Winarno, MAFIS, CA, Ak, S1** Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (Drs.,Akuntan), S2 di Cleveland State University, Ohio, USA (MAFIS), S3 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (Dr). Saat ini Dosen Tidak Tetap di Magister Teknologi Informasi UGM.